

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kegiatan belajar masyarakat berupaya proaktif menyikapi kebutuhan riil masyarakat dalam memenuhi pembelajaran sesuai dengan kondisi dan situasi setempat. Salah satu yang di tempuh adalah “membangun” wadah kegiatan belajar masyarakat (PKBM). Pendekatan yang dikembangkan adalah penyelenggaraan dari, oleh, dan untuk masyarakat melalui lembaga PKBM.

Adapun kebijakan awal pembentukan dan pengoprasian PKBM adalah bermula dari hasil pertemuan antara pendidikan masyarakat dengan direktur dikmas se Indonesia. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yang antara lain adalah mengingat kondisi perekonomian negara dilanda krisis, perlu adanya upaya untuk menginventarisasikan dan perlu dioptimalkan pemanfaatan kembali aset pendidikan masyarakat yang pernah diberikan oleh pemerintah dan masyarakat seperti modul dan bahan – bahan bacaan lainya, alat-alat peraga, dana belajar usaha, peralatan dan ketrampilan, serta sarana belajar lainya. sehingga aset tersebut dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung proses pembelajaran masyarakat. Penyelenggaraan program pendidikan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar lokasinya, dapat diatur kembali penempatanya karena di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2003 masih sangat sulit dalam memantaunya sehingga dapat lebih dikonsentrasikan

penyelenggaraanya agar memudahkan para petugas untuk membina dan memantaunya.

Sebagai salah satu intitusi pendidikan non formal / pendidikan masyarakat dan wadah pembelajaran dari, oleh dan untuk masyarakat , maka PKBM bersifat fleksibel dan netral. PKBM disebut fleksibel antara lain karena ada peluang bagi masyarakat untuk belajar apa saja sesuai yang mereka butuhkan. Di PKBM warga masyarakat dibawah bimbingan tutor dapat secara demokratis merancang kebutuhan belajar yang mereka inginkan. Misalnya disuatu PKBM dapat diselenggarakan beberapa program pembelajaran yang beraneka ragam, seperti program kelompok belajar usaha, keaksaraan fungsional, dan pendidikan luar sekolah seperti kejar paket B atau program kelompok lainnya. Selanjutnya PKBM bersifat netral, karena tidak menggunakan atribut pendidikan nasional atau pemerintah. Oleh karena itu, semua lembaga/ intansi pemerintah atau swasta , atau pihak-pihak lain dapat memanfaatkan keberadaan PKBM sepanjang untuk kepentingan kemajuan masyarakat. Misalnya, ada PKBM yang diselenggarakan oleh LSM, serta pesantren atau lembaga-lembaga keagamaan, organisasi masarakat serta yang diprakarsai oleh perusahaan, depdiknas Kabupaten Wonosobo berperan memfasilitasi, sedangkan prakarsa ada pada masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian keberadaan PKBM memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai basis koordinasi program-program pembelajaran masyarakat. Berkumpulnya tenaga-tenaga tutor program pendidikan masyarakat, tersedianya bahan-bahan belajar / bacaan dan sarana prasarana keterampilan di PKBM

(terutama yang sedang berkembang), merupakan daya pikat tersendiri bagi masyarakat untuk datang ke PKBM. Wadah tersebut akan lebih berdaya guna dan berhasil guna, apabila pihak-pihak yang memiliki program serupa dapat bergabung dan menjalin koordinasi yang optimal.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari laporan petugas pendidikan luar sekolah (non formal) ditingkat propinsi, jumlah PKBM di Indonesia saat ini (per maret 2005) sebanyak 1.896 unit. Secara bertahap jumlah ini terus bertambah seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan pembelajaran masyarakat.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan pemberdayaan PKBM di Kabupaten Wonosobo dirasakan perlu adanya strategi baru dalam pengembangan PKBM dimasa mendatang. Strategi yang diperlukan diantaranya adalah perlunya antisipasi terhadap kebutuhan belajar yang beraneka ragam. untuk itu dianggap sudah mendesak perlu dikembangkan program yang beraneka ragam (diversifikasi dan diferensiasi) juga supaya dapat mempersiapkan pemandirian PKBM perlu adanya unit- unit produksi usaha yang relevan dengan keadaan lingkungan sehingga dapat mengembangkan pusat informasi dan pemasaran hasil-hasil usaha pkbm disetiap kota, perlu juga dikembangkan model lembaga pengembangan bisnis di PKBM yang potensial untuk pembelajaran usaha untuk mengukur kemajuan PKBM dan kriteria dan alat ukur yang jelas, sehingga setiap PKBM dapat menilai kinerjanya sendiri.

Pesatnya perkembangan PKBM dikecamatan leksono Kabupaten Wonosobo ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualitas penyelenggaranya, sehingga banyak terkesan asal berdiri atau dipaksaakan pembentukanya,dalam

upaya penataan keberadaan PKBM yang telah beroperasi baik dilihat dari aspek sarana, ketenagaan, program dan pelaksanaannya kegiatan pembelajaran, maupun manajemennya, maka diperlukan tolak ukur sebagai standar pengelolaannya. Dalam rangka mengantisipasi pesatnya perkembangan jumlah PKBM pada masa yang akan datang, maka dipandang perlu diterbitkan pedoman pengelolaan dan pembinaan pusat belajar masyarakat (PKBM) sebagai acuan atau panduan bagi semua pihak dalam membentuk, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menyelenggarakan PKBM sesuai dengan standar yang telah ditentukan

Oleh karena itu program PKBM harus benar-benar tepat sasaran sehingga tercipta masyarakat yang bermutu tinggi, dalam hal ini peran dinas pendidikan dan pengajaran di Kabupaten Wonosobo sangat penting karena merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung terhadap PKBM perihal apa yang menjadi keputusan dinas tersebut yang terkait dengan program PKBM diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan luar sekolah yang sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan jaman yang semakin berkembang, pemerataan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak, dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat (*Dokumentasi Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo, 2005*). Bila dilihat dari kenyataannya Kabupaten Wonosobo belum bisa meningkatkan kualitas pendidikan luar sekolah sehingga kebijakan yang sudah diterapkan belum terpenuhi secara keseluruhan, karena pada dasarnya daya pendidikan masyarakat di Kabupaten Wonosobo kecamatan leksono masih sangat rendah untuk itu PKBM Diadakan, supaya nantinya masyarakat lebih mengerti apa yang di

canangkan oleh program – program PKBM seperti, ketrampilan buta aksara dan lain sebagainya, dan terutama pendidikan luar sekolah tersebut.

B. PERUMUSAN MASALAH

Bedasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas kiranya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program pusat kegiatan belajar masyarakat di Kabupaten Wonosobo Kecamatan Leksono pada tahun 2005 ?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi program pusat kegiatan belajar masyarakat Kabupaten Wonosobo pada tahun 2005 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui bagaimana implementasi program pusat kegiatan belajar masyarakat di Kabupaten Wonosobo Kecamatan Leksono ?
2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan PKBM tersebut ?

D. KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka dasar teori merupakan bagian yang terdiri dari uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan-hubungan antar variabel berdasarkan

konsep dfinisi tertentu dan didalam bagian ini dikemukakan teori yang menjadi acuan bagi penelitian yang dilakukan.

Menurut koentjoroningrat, (1991 : 11)

“Teori adalah merupakan pernyataan mengenai adanya suatu hubungan antara gejala yang diteliti dalam satu atau beberapa factor tertentu dalam masarakat”.

Menurut sofyan effendi, (1989 : 37)

“Teori adalah merupakan yang paling besar perannya bagi peneliti, karena dalam unsure inilah peneliti mencoba menerangkan fenomena alami yang menjadi pusat perhatian “.

Dengan demikian teori merupakan sarana pokok yang menyatakan hubungan sisitematis antara fenomenal sosial maupun alami yang hendak diteliti, sehingga mempunyai landasan atau pijakan dalam penelitian :

1. Organisasi Pemerintahan Daerah

Dewan Pendidikan

Salah satu organisasi pemerintahan Pendidikan antara lain Dewan Pendidikan. Tujuan dikeluarkannya Undangn Undang Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun 1999 adalah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah dan masyarakat sehingga memberi peluang kepada daerah dan masyarakat agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenagannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.

Penyelenggara pendidikan memerlukan dukungan masyarakat yang memadai. Sebagai langkah alternatif dalam mengupayakan dukungan masyarakat untuk sektor pendidikan ini adalah dengan menumbuhkan keberpihakan yang

bermutu, mulai dari pimpinan negara, sampai aparat yang paling rendah termasuk masyarakat yang bergerak dalam sektor swasta dan industri. Keberpihakan konkret itu perlu disalurkan secara politis menjadi suatu gerakan bersama (*collective action*) yang diwadahi Dewan Pendidikan yang berkedudukan di kabupaten/kota dan komiter sekolah ditingkat satuan pendidikan.

Sifat

Dewan Pendidikan dan komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya. Posisi Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, satuan pendidikan, dan lembaga – lembaga pemerintah lainnya mengacu pada kewenangan masing – masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Tujuan

Tujuan dibentuknya Dewan pendidikan dan Komite Sekolah adalah sebagai berikut :

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan dikabupaten/ kota (Untuk Dewan Pendidikan) dan di satuan pendidikan (Untuk Komite Sekolah).
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dan seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan .
3. Menciptakan suasana dan kondisi tranparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di daerah kabupaten / kota dan satuan pendidikan.

Peran

Peran yang dijalankan dewan pendidikan adalah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Badan tersebut juga berperan sebagai pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Disamping itu juga Dewan pendidikan berperan sebagai pengontrol dalam rangka transparan dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.

Fungsi

Untuk menjalankan perannya itu, Dewan Pendidikan dan Komite sekolah memiliki fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Badan itu juga melakukan kerja sama dengan masyarakat, baik perorangan maupun organisasi, dunia usaha dan dunia industri, pemerintah, dan DPRD berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu. Fungsi lainnya adalah menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Di samping itu, fungsi Dewan Pendidikan dan Komite sekolah adalah memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah.

2. Kebijakan

Dari kata policy, atau dengan kata lain politik sehingga proses kebijakan adalah proses politik. Proses kebijakan merumuskan masalah merupakan kegiatan yang pertama kali harus dilakukan oleh pembuat sebuah kebijakan.

R.S. parker memberikan pengertian sebagai berikut :

“Kebijakan Negara sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang berkenaan dengan politik dengan tujuan yg telah dipilih untuk mencapainya keputusan-keputusan pada prinsipnya masih dalam batas-batas kewenangan kekuasaan ,(Solichin abdul wahab,2001 : 4)

Miftah Thoha (1993 : 58), menyatakan kebijakan dalam arti luas mempunyai dua aspek pokok, yaitu :

- a. Policy merupakan praktika social,bukan even tunggal, sehingga yang dihasilkan pemerintah berasal dari kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.
- b. Policy adalah suatu peristiwa untuk mendamaikan”claim”dari pihak yang berkonflik untuk menciptakan “ incentive” bersama dengan pihak yang menetapkan tujuan.

Dari beberapa pendapat diatas, kebijakan adalah pilihan yang saling bergantung, termasuk keputusan untuk dilakukan oleh badan atau intansi pemerintah dengan tujuan mewujudkan sasaran untuk kepentingan masyarakat.

3. Implementasi Kebijakan

Jimmi Muhammad ibrahim menyebutkan public policy dan implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai :

“Suatu implementasi urusan kepentingan umum,urusan kenegaraan atau dapat juga implementasi kebijakan pemerintah”(jimmi,1991 : 14)

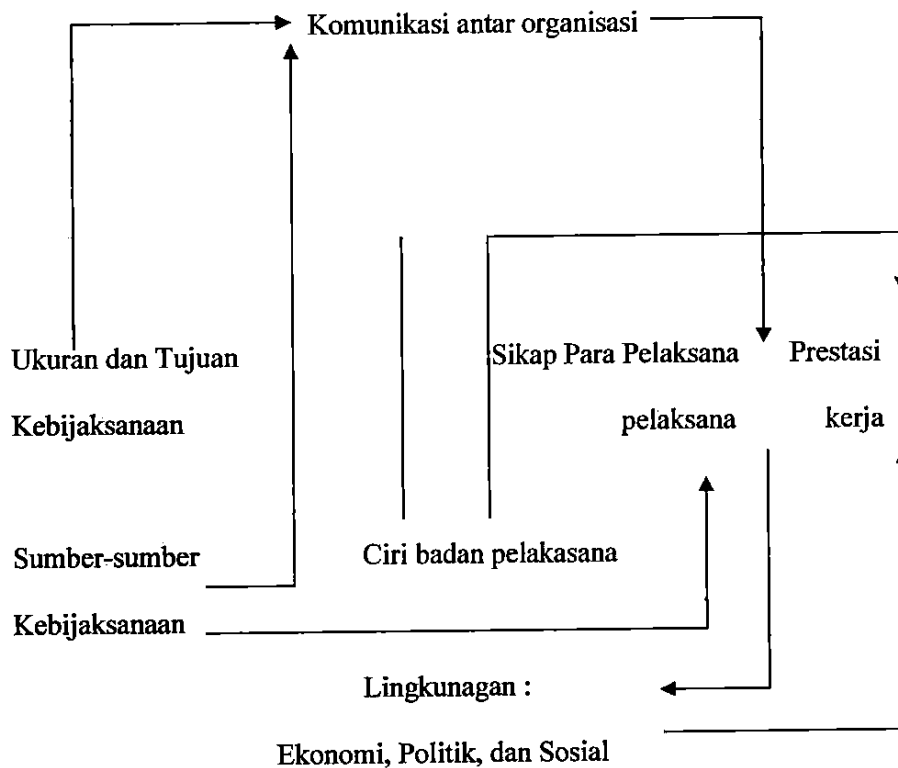
Menurut Amir Santoso (1990 : 9) :

“Analisis mengenai pelaksanaan kebijakan (policy implementation) mencoba mempelajari sebaba – sebab keberhasilan / kegagalan kebijakan melalui pembahasan mengenai factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan seperti masalah kepemimpinan dan interaksi politik di antaranya pelaksanaan kebijakan itu tidak bersifat akademis administrasi belaka tetapi melibatkan masalah politik . dengan demikian studi implementasi mencoba menjawab pertanyaan mengapa hal itu terjadi dan tidak terhenti hanya pada pertanyaan mengapa hal itu terjadi hanya pada pertanyaan apa yang terjadi”.

Van Meter dan Van Horn merumuskan proses implementasi sebagai berikut :

“Tindakan – tindakan yang dilakukan baik indifidu/pejabat atau pemerintah / swasta digariskan dalam suatu keputusan kebijakan “(Sholichin Abdul Wahab,1997 : 65)

Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn

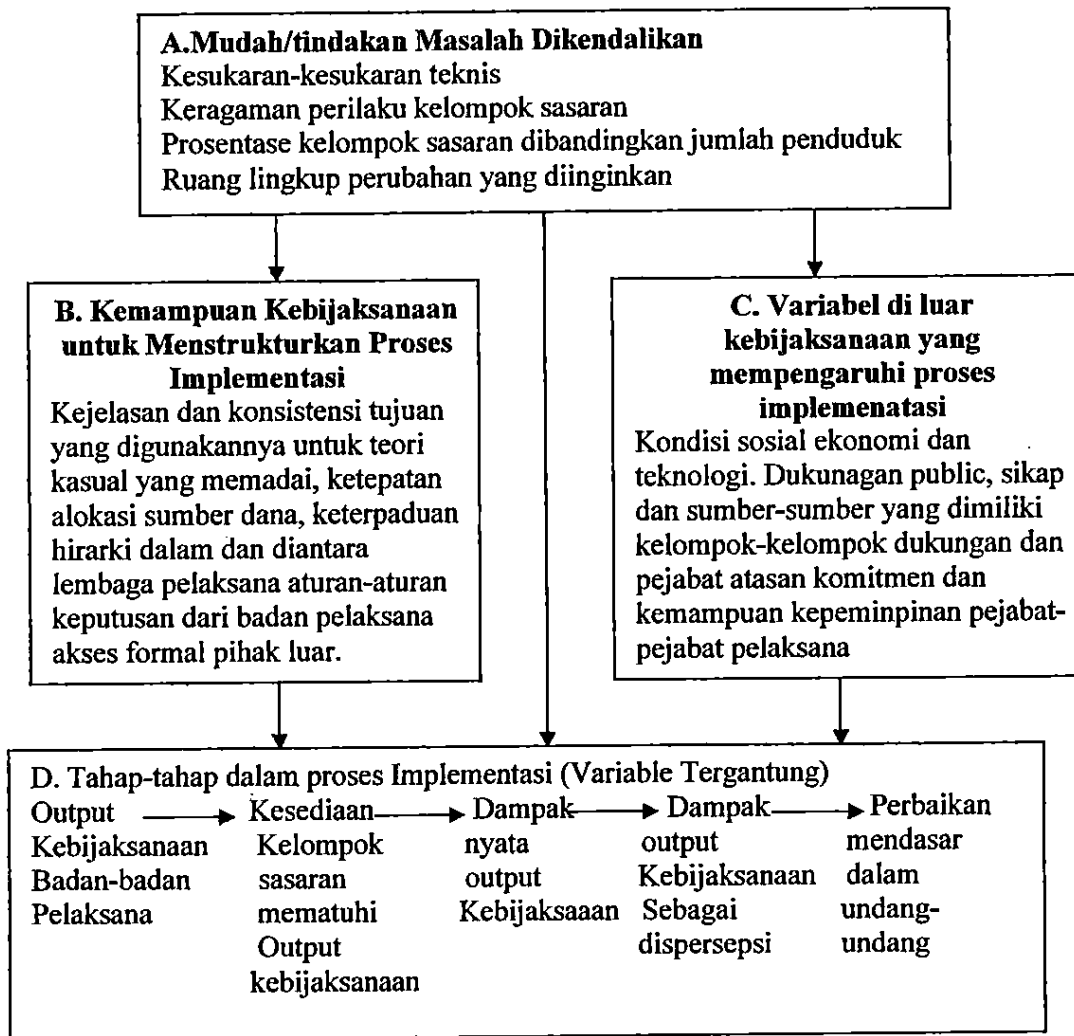


Gambar 1.1 Variabel Proses Implementasi Kebijakan

Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diinyatakan berlaku / dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian dan tindakan-tindakan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat kejadian/kejadian”.

Model Implementasi Menurut Mazmanian dan Sabatier “



Gambar 1.2 Variabel-variabel proses Implementasi Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan, kata implementasi digunakan dalam pengertian yang paling umum termasuk pengguna institusi dan pengungkapan pendapat dan mencangkup tidak hanya penguji kebijakan dalam memilah-milahnya kedalam sejumlah komponen, tetapi juga perancangan dan sintesis alternatif-alternatif baru. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dapat direntangkan mulai penelitian untuk menjelaskan atau memberikan pandangan terhadap isi-isu atau masalah yang terantisipasi sampai mengevaluasi suatu program yang lengkap, beberapa implementasi kebijakan bersifat informal, meliputi tidak lebih dari proses berfikir yang keras dan cermat, sementara yang lainnya memerlukan pengumpulan data yang ekstensif dan perhitungan yang teliti dengan menggunakan proses matematis yang canggih.

Suatu implementasi tentunya mempunyai tujuan untuk mendapatkan keberhasilan, tercatat atau tidaknya suatu tujuan dari implementasi suatu program sangat tergantung oleh adanya faktor-faktor pendukung ikut terlibat didalamnya, yang dimaksud dengan faktor-faktor pendukung adalah sebagai berikut :

- a. Hubungan ketergantungan kecil
- b. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- c. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna terhadap masyarakat
- d. Tersedianya waktu dan sumber-sumber yang memadai
- e. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadai

Implementasi kebijakan yang dalam operasionalnya adalah program, dalam prosesnya terdapat 2 unsur pendukung yang penting dan mutlak, yaitu :

- a. Adanya program yang dilaksanakan

- b. Target Group, yaitu kelompok yang menjadi sasaran penerima manfaat program
- c. Unsur pelaksanaan, yaitu organisasi atau perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan tersebut (Abdullah M.Syukur, 1998 : 52).

Suatu implementasi dikatakan berhasil jika mencapai tujuan yang diharapkan atau memperoleh hasil. Karena pada prinsipnya suatu kebijaksanaan dibuat adalah untuk memperoleh hasil yang diinginkan yang dapat dinikmati atau dirasakan oleh pemerintah.

Tetapi terkadang proses pelaksanaan suatu kebijakan itu tidak selalu mencapai keberhasilan dan sebagaimana tertuang dalam rumusan kebijakan dan sering pula menimbulkan kegagalan, sehingga sering muncul semacam pernyataan tentang sebab-sebab timbulnya kegagalan tersebut. Kegagalan dari pelaksanaan kebijakan itu ada pada sangkut pautnya dengan isi kebijakan yang harus dilaksanakan serta pembagian potensi yang ada.

Sebuah isi kebijakan bisa menyebabkan kegagalan dari suatu pelaksanaan kebijakan terjadi karena samar-samarnya isi dari kebijakan, dalam arti tujuan-tujuan tidak terperinci. Hal ini akan mengakibatkan kurangnya pegangan bagi pelaksana yang akan memperbesar kemungkinan perbedaan pandangan isu kebijakan. Kebijakan yang ingin dijalankan ada kalanya bertentang dengan kebijakan yang lain. Ini juga merupakan salah satu sebab pelaksanaan kebijakan yang tidak berhasil, yaitu terletak pada kurangnya sumber-sumber pendukung antara lain waktu, uang dan tenaga ahli

Berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pembagian potensi diantara aktor-aktor yang terlibat ,struktur dari organisasi pelaksana dapat juga menyebabkan masalah. Hal ini apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang dengan pembagian tugas atau ditandai dengan pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Amir Santoso ,(1990 : 9) mengutip pendapat Van Meks dan Van Horn tentang variable-variable yang membentuk kaitan antara kebijakan dan hasilnya . variabel-variabel tersebut adalah ukuran tujuan kebijakan. Sumber daya, aktivitas komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan dan penyelenggaraanya.

4. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Merupakan bentuk kongkrit dari lahirnya kesadaran bahwa masyarakat merupakan suatu potensi besar yang akan lebih mampu membangun dirinya sendiri yang diwujudkan melalui pendekatan baru yang diharapkan dapat ditangkap oleh masyarakat sebagai pilihan terbaik guna membangkitkan kekuatan besar yang selama ini terpuruk karena senantiasa dininabobokan oleh asumsi yang salah, yakni bahwa masyarakat itu merupakan objek semata.

a. Arah PKBM

PKBM sebagai basis pendidikan masarakat perlu dikembangkan secara komprehensif, fleksibel, beraneka ragam dan terbuka bagi semua kelompok usia, sesuai dengan peranan, hasrat,kepentingan dan kebutuhan belajar masarakat. Dengan program-program yang demikian, masarakat termotivasi

untuk berpartisipasi dalam kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai tindak lanjut program-program yang diselenggarakan PKBM

Program-program diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan kesempatan yang terbuka berdasarkan kebutuhan pasar, serta tersedianya sumber dan faktor pendukung lain yang terdapat dalam masyarakat. Peningkatan taraf ekonomi / kesejahteraan ini diutamakan dengan dasar pemikiran walaupun aspek ekonomi dan sosial saling mempengaruhi namun dalam kenyataannya dipedesaan maupun dipertanian aspek ekonomi adalah titik pangkal kehidupan sosial

b. Fungsi PKBM

PKBM sebagai lembaga yang dibentuk dari oleh dan untuk masyarakat secara kelembagaan padanya melekat beberapa fungsi yang hakiki sulit dipisahkan . fungsi tersebut secara fungsional merupakan karakteristik. PKBM yang sekaligus merupakan citra yang melekat pada PKBM

Fungsi-fungsi antara lain :

1. Sebagai wadah pembelajaran
2. Sebagai tempat semua potensi masyarakat, artinya PKBM sebagai tempat pertukaran berbagai informasi
3. Sebagai pusat dan sumber informasi
4. Sebagai pusat dan sumber informasi
5. Sebagai sentra pertemuan antar pengelola dan sumber belajar
6. Sebagai loka belajar yang tidak pernah kering

7. Sebagai tempat pembelajaran yang dapat digunakan oleh berbagai dapertemen dan lembaga-lembaga pemerintah, serta lembaga buka pemerintah atau swasta, untuk menyampaikan hal-hai atau penjelasan-penjelasaantentang tugas dan tanggungjawabnya didalam melayani masarakat.

Azas PKBM

1. Azas kemanfaatan
2. Azas keberagaman
3. Azas kebersamaan
4. Azas kemandirian
5. Azas keselamatan
6. Azas kebutuhan
7. Azas tolong menolong

E. Definisi Konsepsional

1. Kebijakan

Adalah suatu keterkaitan dari pilihan – pilihan kolektif yang saling tergantung termasuk keputusan-keputusan untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan atau instansi pemerintah tertentu sehubungan untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan sasaran yang diinginkan untuk kepentingan masyarakat.

2. Implementasi Kebijakan

Adalah tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah, individu atau kelompok yang dimaksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan. Termasuk didalamnya adalah mentransformasikan keputusan kedalam tahap oprasionalnya untuk mencapai perubahan seperti yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut

3. Pendidikan Luar Sekolah

- a. Pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan disekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesenambungan
- b. Pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan diluar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjejang dan tidak berkesenambungan.

4. Pusat kegiatan belajar masarakat (PKBM)

adalah sebuah lembaga yang merupakan wadah pembelajaran. Sebagai tempat pusan semua potensi masyarakat, pusat dan sumber informasi serta loka belajar bagi pemberdayaan masyarakat.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengumpulkan variabel atau dengan kata lain definisi operasional

adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel untuk mempermudah penelitian. variabel penelitian ini meliputi :

Indikator – indikator pelaksanaan pendidikan luar sekolah program pusat kegiatan belajar masyarakat.

a. Indikator ukuran dan tujuan kebijakan di ukur melalui :

1. Berkurangnya masyarakat yang buta aksara
2. Berkurangnya masyarakat yang tidak memilikipendidikan yang layak serta ketrampilan yang memadai.
3. berkembangnya usaha dalam meningkatkan pendapat oleh warga belajar yang memanfaatkan pembelajaran ketrampilan yang diperoleh.

b. Indikator sumber daya dapat di ukur melalui :

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang nebdukung pelaksanaan kegiatan program.
2. Tersedianya dana yang memadai sebagai pendanaan dalam setiap program
3. Terciptanya kerjasama yang baik dengan pihak – pihak yang terkait dengan program.

c. Indikator komunikasi dapat di ukur melalui :

1. Tingkat kelancaran pelaksanaan sosialisasi program
2. interaksi pertemuan antara fasilitator dengan masyarakat
3. Terciptanya yang digunakan dalam rangka komunikasi antar falisitor denag masyarakat

d. Indikator sosial, politik, dan ekonomi dapat di ukur melalui :

1. Jumlah bantuan yang diterima, baik individu maupun di setiap kelompok pembelajaran
2. Mendapatkan alternatif usaha yang pasti bagi setiap warga belajar
3. Meningkatnya kesadaran akan pendidikan bagi masyarakat melalui jalur pendidikan luar sekolah.

e. Indikator sikap pelaksanaan dapat di ukur

1. Pengetahuan dan kemampuan yang cukup dari parat pelaksanaan
2. konsistensi pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan tugas
3. Kreatifitas Pelaksanaan dalam pelaksanana program.

G. Metode penelitian

Dalam penelitian metodologi sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian dengan kata lain harus menggunakan metodologi sebagai tuntutan berpikir yang sistematis agar dapat mempertanggung jawabkan secara ilmiah .

H. Jenis Penelitian

Sehubungan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian yang deskriptif bertujuan pada pemecahan masalah yang ada di masa sekarang, karena banyak sekali ragam penelitian yang demikian. Metode penelitian deskriptif lebih merupakan istilah yang umum yang menyangkut pemecahan berbagai teknik deskriptif. Diantaranya penelitian yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasikan penyelidikan dengan teknik survey, teknik interview, observasi, kuisisioner, studi komperatif atau

studi operasional meskipun bentuk-bentuk metode ini banyak, namun ada sifat-sifat tertentu yang ada, pada umumnya terdapat dalam metode deskriptif ini.

Adapun ciri-ciri metode ini adalah :

1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang pada masa-masa aktual.
2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun dan dijelaskan, kemudian dianalisis.

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini menggunakan deskriptif eksploratif yakni penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dan terjadi, tidak menutup kemungkinan adanya pencarian atau penemuan baru dari objek-objek yang diteliti.

I. Lokasi Penelitian

Daerah yang menjadi objek penelitian ini adalah Depdiknas Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo.

Adapun alasan memilih dinas pendidikan dan pengajaran kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo adalah

- Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo merupakan kabupaten, merupakan daerah yang sangat minim pendidikan, sehingga dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Penulis tertarik untuk mengetahui pelaksanaan kebijaksanaan yang diambil pemerintah setempat dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan dunia pendidikan diwilayahnya.

- PKBM di kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo salah satu PKBM yang telah memiliki program-program pendidikan belajar yang lengkap serta akan menjadi partisipasi masyarakat yang sangat mendukung semua program kegiatan.
- Kecamatan Leksono yang sedang berkembang dan berbenah diri dalam hal pendidikan sehingga program pendidikan menjadi acuan.

J. Teknik Pengumpulan Data

Didalam usaha pengumpulan data yang diperlukan dan objek penelitian akan menggunakan taktik-taktik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview / wawancara

Merupakan metode pengumpulan data yang diperlukan dengan mengadakan tanya jawab. Manfaat teknik ini menjelaskan sedetail-detailnya pertanyaan yang diajukan

b. Dokumentasi

Merupakan langkah yang ditempuh penulis dalam mengumpulkan data melalui dokumen –dokumen atau catatan yang tersedia diintansi sesuai dengan materi yang diambil.

c. Observasi

Observasi atau pengamatan digunakan dalam pencarian data penelitian untuk mengetahui adanya rangsangan tertentu yang dengan cara mengamati langsung. Observasi partisipasi adalah pengamat ikut terlibat kedalam kegiatan yang sedang diamati atau dengan kata lain ikut

menjadi pemain, sehingga dapat memenuhi keinginan seorang pengamat yang butuh informasi atau data.

d. kuisisioner

Untuk mengetahui validitas data maka peneliti menyebarkan angket kepada masyarakat Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo.

k. Unit analisis

Unit yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Dikecamatan Leksono kabupaten wonosobo

PKBM

Merupakan bentuk kongkrit dari lahirnya kesadaran bahwa masyarakat merupakan potensi besar yang akan lebih mampu membangun dirinya sendiri yang diwujudkan melalui pendekatan baru yang diharapkan dapat ditangkap oleh masyarakat sebagai pilihan terbaik guna membangkitkan kekuatan besar yang selama ini terpuruk karena senantiasa dininabobokan oleh asumsi yang salah, yakni bahwa masyarakat itu merupakan objek semata.

Arah PKBM

Program – program PKBM diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan kesempatan yang terbuka, untuk peningkatan taraf hidup, kesejahteraan.

Fungsi PKBM

Sebagai tempat semua potensi masyarakat, artinya PKBM sebagai tempat pertukaran berbagai informasi.

Menurut Masri singarimbun, konsep adalah suatu unsur penelitian yang terpenting untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena social maupun alam , secara umum dapat dikatakan bahwa devinisi konseptual dimaksudkan untuk menciptakan keseragaman atau kesamaan

L. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik, yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 1999 : 73). Dalam penelitian ini tehnik pengambilan sampel menggunakan . Simple Random Sampling yaitu teknik sampling (teknik pengambilan sampel) yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Simple Random Sampling dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen, sampel dalam penelitian ini yang diambil minimal 40 orang dengan rincian adalah sebagai berikut:

Tabel Perincian Jumlah Sampel

Nomer	Keterangan	Jumlah Responden
1.	Populasi	200 Orang
2.	Orang yang ada ditempat waktu peneliti melakukan penelitian	120 Orang
3.	Responden yang mengisi kuesioner	60 Orang
4.	Orang yang mengisi kuesioner secara lengkap	40 Orang

Sumber : Data Primer 2007

M. Sumber Data

Karena yang digunakan adalah penelitian deskriptif, maka dibutuhkan data penelitian primer dan sekunder

- a. Data primer, yaitu data langsung dari responden untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan luar sekolah.
- b. Data sekunder, yaitu data yang telah diolah terlebih dahulu untuk memperoleh data dokumentasi mengenai kebijakan pendidikan luar sekolah.

N. Teknik Analisa Data

Penelitian yang bersifat kuantitatif, menurut Winarno Surahmad dijelaskan sebagai berikut :

Sifat dari bentuk penelitian deskriptif kuantitatif ini adalah memutuskan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami suatu hubungan kegiatan pandangan sikap yang nampak, atau tentang proses yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, pertentangan yang sedang meruncingkan dan sebagainya.

Dengan hal- hal tersebut diharapkan akan diambil sesuatu kesimpulan yang dapat diuji kebenarannya sehingga dapat diketahui adanya hubungan sebab akibat antara data-data yang diperoleh dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, dengan menganalisa sejauh mana kebijakan tentang penyelenggaraan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) ini.